



DIPLOMASI MARATON INDONESIA TERHADAP ISU RAKHINE STATE

Triesanto Romulo Simanjuntak

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Surel: triesanto.simanjuntak@uksw.edu

Tanggal pengiriman: 17 Februari 2023 | Tanggal revisi: 13 Maret 2023 | Tanggal diterima: 16 Maret 2023

ABSTRACT

The conflict in Myanmar was triggered by discrimination against one of the ethnic minorities, namely the Rohingya living in Rakhine State. In 2017, the conflict in Rakhine State broke out again when a military operation carried out by the Myanmar military attacked the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), one of the armed militia groups in Rakhine State. This military operation caused the Rohingya ethnic in Rakhine State to become victims. The Indonesian government made a quick move by performing marathon diplomacy. One of the implementations of marathon diplomacy carried out by the Indonesian government is to directly visit Myanmar and meet with several Myanmar authorities who are responsible for the incident. The Indonesian government also went to Bangladesh, visiting the Rohingya refugee sites with the largest number of refugees. This Indonesian marathon diplomacy approach bore fruit because the Indonesian delegates were later well welcomed by the government of Myanmar and Indonesia also received support from the United Nations (UN) and other countries for its humanitarian action in Myanmar.

Keywords: Conflict, Rohingya, Myanmar, Marathon Diplomacy, Indonesia

ABSTRAK

Konflik di Myanmar dipicu oleh diskriminasi terhadap salah satu etnis minoritas, yaitu etnis Rohingya yang menempati Rakhine State. Pada tahun 2017, konflik di Rakhine State pecah kembali akibat operasi militer yang dilakukan oleh pasukan militer Myanmar untuk menyerang *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)*, salah satu kelompok milisi bersenjata yang berlokasi di Rakhine State. Operasi militer ini kemudian mengakibatkan etnis Rohingya di Rakhine State turut menjadi korban. Gerak cepat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan 'diplomasi maraton'. Salah satu implementasi diplomasi maraton yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan langsung mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan beberapa otoritas Pemerintah Myanmar yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Selain itu, Pemerintah Indonesia turut berkunjung ke lokasi pengungsian etnis Rohingya terbanyak di Bangladesh. Pendekatan diplomasi maraton Indonesia ini berbuah hasil karena kemudian diterima dengan baik oleh Pemerintah Myanmar dan Indonesia juga mendapatkan dukungan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara lainnya dalam aksi kemanusiaan di Myanmar.

Kata Kunci: Konflik, Rohingya, Myanmar, Diplomasi Maraton, Indonesia

LATAR BELAKANG

Myanmar memiliki sejarah panjang konflik antaragama dan antaretnis, kekerasan dan represi negara, pembatasan pergerakan penduduk, dan keterbelakangan. Sejarah mencatat umat Muslim, terkhusus etnis Rohingya di negara bagian Rakhine State sering menjadi korban persekusi oleh etnis lain di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Banyak faktor yang menjadi alasan, mengapa Muslim etnis Rohingya menjadi etnis yang menerima banyak sekali tindakan diskriminatif. Gulia Ichikaya Mitzy (2014), dalam tulisannya, menjelaskan bahwa awal dari diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak tahun 1948 ketika Inggris melakukan pemisahan etnis di Myanmar. Masyarakat Buddha Myanmar meyakini bahwa masyarakat etnis Rohingya di Rakhine bukan merupakan kelompok etnis asli Myanmar, melainkan pendatang yang berasal dari Gaur (Bengali/Bangladesh). Namun, menurut kepercayaan masyarakat Muslim etnis Rohingya sendiri, mereka telah menetap di Myanmar, terkhusus wilayah Rakhine, sejak abad ke-7 Masehi sebelum Myanmar terbentuk (Mitzy, 2014).

Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim Rohingya, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan sepuluh orang laki-laki Muslim oleh kelompok dari etnis Rakhine (Siba & Qomari'ah, 2018). Kejadian tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti, serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang minoritas Muslim di Rakhine State. Tercatat, kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012 pada negara bagian Rakhine State. Kekerasan yang meletus di negara bagian Rakhine pada Juni dan Oktober 2012 menyebabkan sekitar 147.000 orang kehilangan tempat tinggal, sekitar 138.000 di antaranya adalah etnis Rohingya. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014, situasi Rohingya yang terisolasi dan minoritas

Muslim di negara bagian Rakhine terus memburuk. Pada Juni 2013, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) melaporkan bahwa komunitas Rakhine telah memblokir akses kemanusiaan kepada 36.000 masyarakat Rohingya di desa-desa terpencil. Pada Juni 2015, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memperkirakan bahwa lebih dari 150.000 orang telah melarikan diri dari wilayah perbatasan Myanmar dan Bangladesh sejak Januari 2012. Dalam enam bulan pertama tahun 2015, diperkirakan 31.000 orang meninggalkan Myanmar dan Bangladesh (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2017).

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah dirasakan pasca kolonisasi Inggris di Myanmar. Dalam Akta Kewarganegaraan Kesatuan Tahun 1948, Pemerintah Inggris kemudian tidak mengakui adanya etnis Rohingya sebagai bagian dari negara Myanmar (Budaya, 2017). Etnis Rohingya dihadapkan dengan terbatasnya akses dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan untuk bepergian atau melaksanakan kegiatan agama mereka sendiri. Hal itu dianggap menjadi alasan mereka pergi dari Myanmar. Terhitung pada tahun 2015, terdapat 25.000 pengungsi warga Muslim Myanmar yang menggunakan perahu ke Bangladesh, bahkan tidak jarang sampai ke Malaysia dan Indonesia (DW, 2015). Pada 21 Mei 2015, menteri luar negeri dari ketiga negara (Malaysia, Indonesia, dan Thailand) bertemu di Kuala Lumpur untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi di Myanmar tanpa mengintervensi negara tersebut.

Pertemuan yang dilangsungkan membuahkan hasil di mana Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengizinkan kapal orang Rohingya bersandar di negaranya dan bersedia menampung pengungsi Rohingya, tetapi hanya dengan syarat bahwa masyarakat internasional memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu memukimkan kembali atau memulangkan semua penumpang dalam waktu satu

tahun (BBC News Indonesia, 2015). Lebih lanjut, Indonesia dan Malaysia menyatakan akan menjamin nasib lebih dari 7.000 orang yang masih terkatung-katung di sekitar Selat Malaka. Ratusan pengungsi juga diselamatkan oleh nelayan Aceh dari kapal yang terancam karam di lepas pantai Aceh. Menurut keterangan pejabat dan nelayan lokal, ada 433 orang yang dibawa ke tempat-tempat penampungan di Aceh Timur.

Dalam hal hubungan bilateral, hubungan antara Indonesia dan Myanmar telah terjalin cukup lama. Jika ditarik dari akar sejarah, relasi antara Indonesia dan Myanmar telah terjadi sejak dua tahun pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain sebagai negara berdaulat. Setelah dari realisasi pengakuan tersebut, kedua negara kemudian telah membangun kantor perwakilan diplomatik untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Setelah hadirnya perwakilan diplomatik, hubungan kedua negara terpantau akrab dengan beberapa kerja sama yang terjadi. Terkhusus kemudian sektor kerja sama penerbangan menjadi kerja sama antara kedua negara. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pada tahun 1949, Rangoon menjadi tempat bagi terbentuknya *Indonesia Airways* oleh para perwira Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Indonesia kemudian memenuhi kebutuhan pesawat terbang Myanmar di tahun-tahun tersebut (Bhawono, 2017). Pada tahun 1955, Soekarno bersama Perdana Menteri Burma (U Nu), Perdana Menteri India (Jawaharlal Nehru), dan Presiden Mesir (Gamal Abdul Nasser) menginisiasi Konferensi Asia-Afrika di mana Bandung menjadi tuan rumah pertemuan pertama.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang saat itu dikenal dengan Orde Baru, kedua pemimpin negara baik dari Indonesia dan Myanmar tercatat saling mengunjungi. Pada 26 November 1972, 26 Agustus 1974, dan 21 Februari 1997 tercatat terjadi kunjungan oleh Soeharto ke Myanmar. Lalu, kunjungan ini juga

dibalas oleh Presiden Myanmar, Ne Win yang mendatangi Jakarta pada tahun 1997. Tingginya intensitas saling mengunjungi ini kemudian ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan Indonesia yang kemudian beroperasi di Myanmar. PT Indomiwon Citra Inti (tahun 1991) dan PT Elektrindo Nusantara (1993) tercatat telah melakukan transaksi perdagangan (ekspor) ke Myanmar pada tahun-tahun tersebut (Aryani, 2019).

Memasuki masa reformasi, tidak banyak hubungan yang tercipta, baik pada sektor politik maupun ekonomi. Namun, hubungan ini kemudian meningkat memasuki tahun 2017, ketika Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon mengadakan promosi dan temu bisnis dalam rangkaian kegiatan Indonesia dan Myanmar, yaitu *Business Matching, Indonesian Products, Tourism and Culture Exhibition (IPTC)*, serta *Wonderful Indonesia* di Yangon sekitar tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2017 (Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon, n.d.).

Penelitian ini kemudian berusaha melihat bagaimana konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Myanmar. Secara sederhana, Indonesia kemudian melakukan pendekatan kemanusiaan melalui bantuan dan perhatian terhadap kejadian yang dihadapi oleh etnis Rohingya di Myanmar. Namun salah satu model pendekatan kemanusiaan yang dilakukan adalah dengan memakai 'diplomasi maraton' (*marathon diplomacy*) yang ditujukan tidak hanya melalui pendekatan langsung terhadap Myanmar, namun juga terhadap beberapa negara yang dianggap memiliki dampak terhadap isu etnis Rohingya (Gunawan, 2017). Adapun tujuan dari penelitian ini kemudian berusaha untuk mengelaborasi lebih jauh bagaimana penerapan diplomasi maraton yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam keikutsertaan secara kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Diplomasi Publik

Hubungan luar negeri yang dilakukan antarnegara kerap diimplementasikan dengan melakukan metode diplomasi. Diplomasi adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara melalui dialog atau negosiasi untuk meredakan suatu konflik (Carlsnaes et al., 2014). Dengan berdiplomasi, negara-negara akan mengirimkan perwakilan kenegaraan mereka baik dalam bentuk diplomat (korps diplomatik) maupun duta besar yang memiliki kekuasaan dan otoritas layaknya pemimpin negara dalam sebuah negara (Syahmin, 2008). Para perwakilan diplomatik ini kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendekatan secara damai kepada negara tujuan baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk aktivitas kenegaraan antara kedua negara.

Pada prinsipnya, diplomasi merupakan tindakan hubungan damai antara entitas-entitas politik, para pelaku dan agen-agen yang diberi wewenang (Carlsnaes et al., 2014). Semangat hubungan damai ini kemudian membuat beberapa pendekatan dalam diplomasi, salah satunya adalah melalui 'diplomasi publik'. Awalnya diplomasi publik merupakan salah satu jenis pendekatan yang dilakukan oleh para perwakilan diplomatik di suatu negara. Namun memasuki abad ke-21, pendekatan diplomasi publik sudah mulai jamak sekali dilakukan sehingga membuat beberapa akademisi dapat membuat terminologi diplomasi publik menjadi sebuah teori.

Jika merujuk pada akar sejarah, awal mula hadirnya diplomasi publik kemudian dapat dilihat ketika mesin cetak ditemukan pada abad ke-15 (Melissen, 2005). Penemuan mesin cetak inipun membuat negara-negara semakin rutin menampilkan 'wajah yang baik' dalam berita-berita yang menjadikan sebuah pendekatan dalam diplomasi publik. Maju pada masa politik kontemporer saat ini, salah satu penerapan diplomasi publik adalah ketika negara memakai aktor-aktor

non-negara dalam aktivitas kenegaraan mereka. Pada tahun 1990-an, Jepang kemudian dikenal dengan memakai pendekatan budaya populer dengan memakai seniman-seniman manga yang pada saat itu tumbuh berkembang dan menjadikan beberapa karakter manga, seperti Doraemon menjadi '*ambasador*' mereka pada tahun tertentu (Effendi, 2011).

Hans Tuch, salah satu birokrat Amerika Serikat, dalam buku yang ditulis oleh Jan Mellisen (2005) memberikan definisi bahwa diplomasi publik merupakan proses komunikasi pemerintah dengan publik luar negeri yang memiliki tujuan untuk membuat kesepahaman tentang ide nasional mereka dan ide-ide lainnya serta institusi dan budaya sesuai dengan kebijakan nasional. Jika kita berkaca pada konteks 'ide nasional' Indonesia, negara ini kemudian lekat dengan beberapa prinsip penting yang kemudian tertuang baik dalam tujuan dasar negara ini hadir sampai pada implementasi beberapa pendekatan diplomasi. Salah satu dasar penting dalam tujuan politik luar negeri Indonesia merujuk pada aline ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) disebutkan bahwa, "...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial,..." (DPR, 2016). Dasar-dasar ini kemudian diimplementasikan pada berbagai macam bentuk diplomasi Indonesia seperti rutin terlibat dalam pasukan perdamaian PBB melalui pengiriman Kontingen Garuda, dukungan terhadap negara tertindas akibat perang, dan pemberian bantuan terhadap warga-warga dunia yang menjadi korban dalam peperangan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ke etnis Rohingya.

Konsep Diplomasi Maraton

Upaya Indonesia untuk membantu etnis Rohingya di Myanmar kemudian tidak terjadi dalam usaha yang sederhana. Pemerintah Myanmar dikenal sering

menolak bantuan yang diberikan oleh negara-negara lain atau berbagai organisasi internasional untuk negara mereka. Salah satu bantuan yang ditolak oleh Pemerintah Myanmar adalah bantuan dari PBB. Alasan pemerintah Myanmar menolak bantuan adalah karena alasan situasi keamanan yang masih belum kondusif di negara mereka (Maulana, 2017). Akibatnya, negara-negara atau organisasi internasional kemudian berpikir panjang untuk memberikan bantuan langsung kepada Pemerintah Myanmar.

Diplomasi maraton yang kerap disebut oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi kemudian merupakan sebuah langkah cepat dengan melakukan kunjungan ke beberapa pihak, baik ke Myanmar sebagai negara yang berkonflik maupun negara sekitar yang terdampak akibat konflik yang terjadi di Myanmar. Awal mula konflik pada tahun 2017 tercatat terjadi pada tanggal 25 Agustus. Waktu itu sekelompok militan Rohingya yang menamakan dirinya *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) melakukan serangan di negara bagian Rakhine, pesisir Myanmar (DW, 2022). Lalu kurang lebih satu pekan berikutnya, Menlu Indonesia bertolak ke Myanmar untuk bertemu beberapa pihak perwakilan kenegaraan Pemerintah Myanmar seperti panglima militer, penasehat negara, sejumlah menteri, perwakilan PBB, dan duta besar yang ada di Yangon. Pertemuan tersebut kemudian mendorong hadirnya sebuah solusi yang diinisiasi oleh Menlu Marsudi. Setelah bertolak ke Myanmar, Marsudi kemudian melanjutkan perjalanan ke Bangladesh yang menjadi destinasi tujuan para pengungsi korban insiden di Rakhine State (Ariefana, 2017).

Pendekatan diplomasi publik yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia lebih kepada menekankan pada komunikasi langsung serta penyampaian ide terkait prinsip perdamaian. Secara khusus, pendekatan diplomasi publik ini dilakukan dengan melakukan praktik diplomasi maraton yang tujuannya langsung mendatangi

pihak-pihak yang berkonflik dan terdampak dengan mengedepankan prinsip perdamaian melalui komunikasi yang baik kepada para pihak.

METODOLOGI

Penelitian ini memakai metodologi penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam buku Umar Suryadi Bakry (2019), pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan pemahaman dari individu atau kelompok orang terkait kompleksitas masalah sosial dan kemanusiaan. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini terkait masalah konflik sosial yang terjadi di Myanmar yang mengakibatkan masalah kemanusiaan dalam skala internasional membuat metode penelitian ini tepat untuk dipakai dalam tulisan ini.

Secara pendekatan, tulisan ini kemudian menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa pendekatan deskriptif lebih mengarah kepada analisis fenomena yang ada dengan menggunakan teori sekaligus konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk mendukung analisis yang ada, metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode pengumpulan data sekunder. Penulis akan mengumpulkan tulisan-tulisan berupa artikel-artikel jurnal, berita-berita, serta buku-buku yang representatif terhadap topik yang diangkat oleh peneliti.

DISKUSI

Kebijakan diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Muslim Rohingya merupakan suatu keadaan yang diakibatkan pada masa kependudukan Inggris. Pada masa kolonial Inggris di Burma (sebelum namanya berubah menjadi Myanmar), tidak ada batas teritorial yang jelas. Begitu juga dengan keberpihakan Inggris pada etnis Burma yang mengakibatkan kekuasaan tertinggi ada pada wilayah Burma-Myanmar, dan ditambah lagi dengan kudeta yang dilakukan oleh

Ne Win pada tahun 1962 (Mitzy, 2014). Kekuasaan Ne Win, yang menjadi pemimpin *Union Revolutionary Council* (URC), membuat ideologi negara Burma-Myanmar menjadi sosialis.

Pergerakan yang terjadi di Burma akibat krisis politik ini menjadi respon terhadap otoritarianisme di akhir tahun 1950 karena adanya titik ketidakseimbangan antara institusi sipil dengan militer. Pada tahun 1982, ada juga Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan Myanmar yang menyatakan bahwa Rakhine tidak diakui sebagai warga dari negara Myanmar. Bahkan sejak tahun 1978 sampai saat ini, banyak sekali penolakan atas status kewarganegaraan, adanya batasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bahkan terjadi kekerasan sistematis berupa pembasmian etnis atau kejahatan genosida, terjadi pemerkosaan, dan pembunuhan. Setelah pemilihan umum pada tahun 1960, dapat dikatakan bahwa dalam periode ini banyak sekali terjadi pemberontakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketika pemerintah hendak membuat undang-undang serta ingin menjadikan Burma-Myanmar menjadi sebuah negara Buddha pada tahun 1962. Pada tahun 1980 dan 1990-an, ada sekitar empat puluh kelompok etnis pemberontak yang melakukan aksi gencatan senjata (Budaya, 2017).

Sejarah Diskriminasi Etnis Rohingya

Pada tahun 1988, sekitar 150 ribu Muslim dievakuasi dari rumah mereka di Arakan untuk membangun desa dan rumah umat Buddha dalam konteks upaya untuk mengubah komposisi demografi negara. Pada tahun 1991 terjadi pengusiran lebih dari setengah juta Muslim sebagai pembalasan atas suara mereka yang mendukung oposisi dalam pemilihan parlemen yang dibatalkan hasilnya. Hal ini karena pemerintah menarik kewarganegaraan ratusan ribu Muslim. Sejak deklarasi kemerdekaan Myanmar (Burma) pada tahun 1948, konstitusi tidak mengakui kaum Muslim dengan dalih bahwa leluhur mereka bukan penduduk asli negara tersebut.

Sejak itu, kaum Muslim Rohingya belum diperlakukan sebagai warga negara, di mana itu untuk mencegah orang-orang Rohingya bekerja di pemerintahan atau menyelesaikan pendidikan mereka. Penguasa militer yang merebut kekuasaan pada tahun 1962 melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya dan mengusir mereka ke Bangladesh pada interval yang berbeda mulai 150.000 sampai setengah juta orang (Tindaon et al., 2013).

Sejak tahun 1970-an, para pengungsi dan migran beralih ke negara-negara Bangladesh, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, membentuk badan transnasional komunitas Rohingya yang menemukan kembali kehidupan mereka dalam berbagai konteks politik dan budaya. Ketegangan etnokultural antara orang Arakan dan Rohingya di satu sisi, dan kebijakan negara tentang pengucilan di sisi lain, telah menjadi pendorong terjadinya konflik yang berlangsung lama dan keras yang mencapai kembali ke periode akhir kolonial.

Tahun 1980-an merupakan puncak diskriminasi yang dirasakan oleh etnis Rohingya di Myanmar, mulai dari diberlakukannya UU Kewarganegaraan 1982, di mana Myanmar hanya mengakui etnis yang telah lama (sebelum pendudukan kolonial Inggris, 1824) menjadi etnis Myanmar. Warga Rohingya etnis Bengali tidak termasuk di dalamnya. Memasuki tahun 1989, pemerintah junta militer kemudian memberlakukan perubahan nama Provinsi Arakan menjadi Provinsi Rakhine yang memberikan implikasi bahwa keistimewaan etnis Rohingya yang mayoritas di kawasan ini (90%) diberikan kepada etnis minoritas Rakhine (10%) yang beragama Buddha (Revolusi, 2013).

Beberapa kebijakan diskriminatif yang dirasakan oleh etnis Rohingya di Myanmar kemudian membuat benturan konflik tidak terelakkan. Tahun 2012 menjadi salah satu catatan konflik yang berakibat fatal di Myanmar. Dimulai dari terjadinya pemerkosaan Ma Thida Htwe (Buddha dari Rakhine) oleh laki-laki Rohingya di kota Yanbe. Kejadian ini kemudian membuat aksi balas dendam

terhadap etnis Rohingya yang mengakibatkan 10 orang Muslim terbunuh. Terhitung kerusuhan kemudian melanda tiga kota berbeda di Rakhine yaitu Sittwe, Maungdaw, dan Buthidaung (Tysara, 2022).

Konflik Tahun 2017

Konflik yang terjadi di Myanmar dimulai pada Agustus 2017 ketika terjadi serangan yang dilakukan oleh ARSA. ARSA didirikan oleh seorang muslim Rohingya yang bernama Atta Ullah. Awalnya gerakan ini bernama “Harakah al-Yaqin” yang memiliki arti harfiah ‘Gerakan Iman’. Atta Ullah lahir di Pakistan, tepatnya di kota Karachi dari seorang ayah imigran dari Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar sejak tahun 1960-an. Atta Ullah sempat mengenyam pendidikan di sebuah sekolah Islam di Mekah, Arab Saudi. Disinyalir pada tahun 2012, Atta Ullah meninggalkan Arab Saudi tidak lama setelah terjadinya kekerasan di Rakhine. Atta Ullah dan ARSA kemudian melakukan serangan pertama pada tahun 2016 di Pangkalan Markas Besar Polisi (Fair, 2018).

Bukan tanpa sebab kelompok ARSA ini kemudian hadir menjadi salah satu ‘kelompok pembela’ etnis Rohingya di Myanmar. Sejak tahun 1982, melalui Hukum Kewarganegaraan (*Citizenship Law*), etnis Myanmar kemudian dianggap bukan bagian dari 135 etnis yang diakui sebagai suku bangsa Myanmar. Otoritas yang berkuasa pada saat itu kemudian menyamakan etnis Rohingya dengan etnis Bengali yang ada di Bangladesh. Alasannya karena etnis Rohingya dan Bengali memiliki kesamaan agama, warna kulit, dan kebudayaan. Kebijakan ini dibuat untuk mengakomodasi tuntutan kelompok Nasionalis Buddha dan kelompok radikal lainnya yang ada di Myanmar (Bhattacharjee, 2019).

Diskriminasi ini kemudian menghadirkan adanya beberapa kelompok pemberontak dari etnis Rohingya. Berikut beberapa kelompok pemberontak yang tercatat pernah hadir di Myanmar. Kelompok-kelompok ini memiliki tujuan

memperjuangkan hak-hak politik dan kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar.

Tabel 1.
Beberapa Kelompok Pemberontak Etnis Rohingya

No.	Tahun	Nama Kelompok Pemberontak
1.	1974	<i>Rohingya Patriotic Front</i>
2.	1982	<i>Rohingya Solidarity Organization</i>
3.	1986	<i>Arakan Rohingya Islamic Front</i>
4.	1988	<i>Arakan Rohingya National Organization</i>
5.	2016	<i>Harakan Al Yakin</i>
6	2017	<i>Arakan Rohingya Salvation Army</i>

Sumber: (Fair, 2018)

Kehilangan hak kewarganegaraan membuat etnis Rohingya kemudian dikucilkan dalam beberapa hak, seperti kebebasan bergerak, pernikahan, pendidikan, dan hak asasi manusia yang mendasar lainnya. Gerakan-gerakan pemberontak sejatinya telah hadir sejak tahun 1974. Kelompok pemberontak pertama pada tahun tersebut bernama *Rohingya Patriotic Front* (RPF). Namun seiring berjalannya waktu, kelompok ini kemudian terpecah menjadi beberapa faksi. Suksesor yang kemudian dianggap paling terkenal setelah RPF adalah *Rohingya Solidarity Organization* (RSO). RSO terbentuk pada tahun 1982, namun kelompok ini terpecah pada tahun 1986 dan memunculkan *Arakan Rohingya Islamic Front* (ARIF). RSO dan ARIF kemudian membentuk aliansi pada tahun 1988 yang dikenal dengan sebutan '*Arakan Rohingya National Organization*' (Fair, 2018).

Kembali pada serangan yang dilakukan oleh ARSA pada tahun 2017, serangan ini kemudian dimulai ketika ARSA menyerang 30 pos polisi dan pangkalan militer di utara bagian Rakhine (Setiawan & Suryanti, 2021). Akibat dari serangan ini, kemudian Pemerintah Myanmar melakukan operasi militer di desa Gu Dar Pyin. Operasi ini menewaskan 250 orang dan ratusan ribu rumah rumah Muslim Rohingya dibakar. Otoritas Pemerintah Myanmar kemudian menolak klaim jumlah

korban yang merupakan laporan hasil investigasi komisi penyelidikan yang disetujui oleh militer dan Pemerintah Myanmar. Namun, Pemerintah Myanmar hanya mengakui bahwa korban berjumlah 19 orang dan menganggap bahwa seluruh korban merupakan kelompok teroris (Setiawan & Suryanti, 2021)

Akibat kebijakan serangan balasan yang dilakukan oleh militer Myanmar pada kelompok ARSA di negara bagian Rakhine, terjadi gelombang pengungsi etnis Rohingya menuju Bangladesh. Pada tanggal 5 September 2017, tercatat lebih dari 120.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Gelombang pengungsi ini kemudian menambah beban negara Bangladesh yang sebelumnya masih terdapat setidaknya 200.000 warga Rohingya yang mengungsi pasca konflik pada tahun-tahun sebelumnya (DW, 2022).

Kehadiran Pemerintah Indonesia dalam Mereduksi Konflik di Myanmar

Masalah kemanusiaan kemudian menjadi isu sentral akibat konflik antara etnis Rohingya dan Pemerintah Myanmar. Konflik ini kemudian berdampak bagi etnis Rohingya yang kemudian menjadi pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara lain. Pemerintah Indonesia kemudian hadir untuk memberikan respon terhadap konflik ini. Melalui KBRI Yangon, Menlu Retno Marsudi langsung mendatangi Myanmar untuk bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata U Ming Aung Hlaing dan Aung San Suu Kyi pada 4 September 2017. Pada pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan formula 4+1 yang di antaranya berisi: perdamaian dan keamanan, pertahanan diri maksimum dan tanpa kekerasan, perlindungan tanpa memandang etnis dan agama, serta pentingnya membuka akses penyaluran bantuan kemanusiaan (Hidayat, 2017).

Sebelum bertolak ke Myanmar, Menlu Marsudi telah bertemu dan melakukan komunikasi dengan beberapa aktor politik global yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mendukung Indonesia terlibat dalam konflik di Myanmar.

Komunikasi tersebut dilakukan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang diutus langsung oleh PBB sebagai utusan khusus PBB untuk Rakhine. Aktivitas ini kemudian dianggap oleh Marsudi sebagai bagian dari '*Marathon Diplomacy*'. Marsudi menyatakan:

Sepanjang perjalanan saya ke Myanmar dan ke Bangladesh, saya sebut *marathon diplomacy* untuk kemanusiaan. Sejak sebelum saya berangkat ke Myanmar, saya sudah melakukan banyak sekali komunikasi (Hidayat, 2017).

Tak kurang beberapa pemimpin dunia kemudian memberikan apresiasi dan dukungan terhadap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Marsudi dalam isu Rohingya. Menlu Belanda Bert Koenders, Menlu Inggris Boris Johnson, dan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif juga memberikan dukungan terhadap usaha Indonesia ini. Kehadiran pemerintah Indonesia tidak berdiri secara tunggal, tak kurang Marsudi kemudian menggandeng beberapa organisasi internasional untuk terlibat membantu masalah kemanusiaan yang dirasakan oleh etnis Rohingya. *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang berlokasi di Bangladesh juga terlibat untuk membantu pengungsi Rohingya di negara tersebut. Tak lupa, Marsudi juga melibatkan ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara (Hidayat, 2017). Walaupun memiliki semangat non-intervensi sebagai bagian dari *ASEAN Way*, ASEAN memiliki sejarah panjang dari tahun 1960-an untuk menyebarkan semangat perdamaian bagi negara-negara anggota.

Pada akhir bulan September, tepatnya pada tanggal 29 September 2017, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Rohingya. 10 kontainer yang berisi kebutuhan pokok (seperti mi instan, gandum, dan makanan balita) dikirim ke Rakhine State. Pemerintah Indonesia juga membangun Rumah Sakit Indonesia-Myanmar yang berlokasi di Myauuk U di kawasan Rakhine State. Tak lupa, bantuan makanan dan obat-obatan juga disusulkan dalam proses

pembangunan rumah sakit tersebut (Indonesia Baik, 2017). Aktivitas diplomasi kemanusiaan yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada aras pengambil kebijakan, tetapi juga pada lapisan kelompok masyarakat yang terdampak langsung akibat konflik ini.

Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Melalui Bantuan Kemanusiaan

Diplomasi kemanusiaan melalui bantuan merupakan salah satu implementasi rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Etnis Rohingya yang terdampak akibat konflik di Rakhine State bukan kali pertama diberikan bantuan langsung oleh Pemerintah Indonesia pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Satu dasar penting kebijakan luar negeri Indonesia memang tidak terdapat pada sebuah penjelasan yang sangat eksplisit. Jika ditarik dari proses kampanye yang dilakukan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terdapat sembilan program yang sering disebut sebagai “Nawacita Jokowi-JK”.

Politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu indikator yang terdapat pada program ke-4 terkait ‘menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara’ (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2015). Pada bagian tersebut tidak dijelaskan dengan eksplisit bagaimana tindakan dan implementasi dari politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang telah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Tercatat bahwa Wakil Presiden Pertama Indonesia, yaitu Mohammad Hatta, yang memberikan pandangan terhadap Politik Bebas Aktif. Pada tanggal 2 September 1948, Hatta memberikan pidato yang berjudul “Mendayung di antara Dua Karang” (Adryamarthanino, 2022).

Jika ditafsirkan terkait ‘Mendayung di antara Dua Karang’ merupakan sebuah analogi terhadap situasi politik internasional yang terjadi pada saat itu, tahun 1948

merupakan tiga tahun pasca kemerdekaan dan berakhirnya Perang Dunia II. Indonesia sebagai salah satu negara yang baru merdeka bukan merupakan negara besar, merujuk pada pengaruh secara politik global. Indonesia justru merupakan negara yang terdampak akibat kolonisasi oleh Belanda dan Jepang di tahun tersebut. Sebagai negara yang baru merdeka, politik internasional saat itu terbagi dalam dua kubu besar, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutusekutunya di kawasan Eropa Barat yang berideologi Liberalis-Kapitalis, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta beberapa negara di kawasan Eropa Timur, Asia Timur (Tiongkok), dan beberapa negara Asia Tenggara (Vietnam, Laos, dan Kamboja) yang terkena pengaruh paham Sosialis-Komunis pada saat itu. Hatta dengan lantang menyerukan bahwa ‘Dua Karang’ yang merujuk pada Amerika Serikat dan Uni Soviet bukan menjadi tumpuan politik luar negeri Indonesia pada saat itu. Pemerintah Indonesia yang baru merdeka ini kemudian mengarahkan tujuan politik luar negeri mereka yang lebih berdikari dan mandiri dari pengaruh kedua kekuatan global pada saat itu.

Kemudian terkait ‘aktif’ dalam politik luar negeri Indonesia ‘bebas-aktif’ dapat kita lihat dalam beberapa bentuk. Lahirnya ide dapat dilihat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 45 sebagai berikut: “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial...” (DPR, 2016). Ketertiban dunia kemudian terimplementasi dalam bentuk pengiriman Kontingen Garuda. Kontingen Garuda merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikirimkan secara rutin ke wilayah-wilayah konflik di seluruh dunia.

Kembali pada konflik di Myanmar pada tahun 2017, Indonesia kemudian menjalankan ‘diplomasi maraton.’ Konsep dari diplomasi maraton sendiri, melakukan bentuk diplomasi dengan berbagai negara dalam rentang waktu tertentu. Diplomasi maraton Indonesia untuk isu diskriminasi yang dialami oleh Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar dilaksanakan mulai tanggal 3-5 September 2017,

dengan fokus perjalanan ke Myanmar dan Bangladesh. Pertemuan pertama dilaksanakan di Myanmar dengan diwakili oleh Menlu Retno Marsudi dan perwakilan penting Myanmar, di antaranya Aung San Suu Kyi (*State Counsellor of Myanmar*), Kofi Annan (Ketua *Rakhine Advisory Commission*) yang bertugas meneliti dan menyajikan laporan atas isu yang terjadi, panglima militer Min Aung Hlaing, dan perwakilan-perwakilan menteri serta duta besar di Yangon dan Naypyidaw. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di Bangladesh bersama dengan menteri dan Pemerintah Bangladesh serta perwakilan IOM dan UNHCR.

Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di masing-masing negara tersebut dimaksudkan untuk, di antaranya: (i) Dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintahan Myanmar, Indonesia menyampaikan aspirasi dalam penyelesaian konflik dengan mengusulkan agenda rumusan yang tertuang dalam formula 4+1. Sedangkan, (ii) Pertemuan di Bangladesh bersama pemerintah dan perwakilan organisasi internasional dimaksudkan untuk mendapatkan informasi serta kepastian tentang korban pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari isu yang terjadi, dengan mengunjungi Kamp Pengungsi Kutupalong di Cox's Bazar, wilayah perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar.

Selain dari fokus pertemuan yang dilakukan oleh Indonesia dengan kedua negara tersebut, pertemuan-pertemuan lain juga dilaksanakan demi kemudahan terwujudnya agenda perbantuan penanganan isu kemanusiaan yang dilakukan. Dikutip dari lama pemberitaan online VOA Indonesia, dalam pertemuan debat Sidang Majelis Umum di Markas Besar PBB di New York pada 21 September 2017, Indonesia juga mengangkat pembahasan tentang isu kemanusiaan atas diskriminasi yang dialami oleh minoritas Muslim Rohingya di Rakhine State dan menyampaikan usulan proposal penyelesaian konflik yang tertulis dalam agenda rumusan formula 4+1 (Gunawan, 2017). Pertemuan bilateral dengan total 72 negara sebelumnya juga dilakukan oleh Indonesia selain dengan alasan agenda kerja sama bilateral yang

terjalin serta pembahasan tentang usaha menjamin perdamaian dunia dalam dialog antaragama, juga mencari dukungan suara dalam usaha Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan menunjukkan bentuk peran aktif Indonesia dalam penyelesaian isu kemanusiaan di Myanmar.

Kofi Annan, selaku utusan khusus untuk Rakhine, menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah yang terjadi di Rakhine State, yang di dalamnya berisi kritikan perbaikan UU Kewarganegaraan 1982 yang dianggap rumit dan hanya menguntungkan kelompok etnis tertentu. Hal ini kemudian akan ditanggapi oleh pihak pemerintahan Myanmar, jika Muslim Rohingya mengakui diri mereka sebagai “Bengali”. Namun, kelompok muslim Rohingya bersikeras menentang dengan menyebutkan bahwa mereka telah lama tinggal dan lahir di Myanmar, bahkan sebelum terbentuk sebagai negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Isi lain laporan ini menyuarakan kepada pihak Pemerintah Myanmar agar menutup kamp-kamp pengungsian yang ada di Myanmar dan menerima mereka sebagai penduduk. Dikutip dari laman pemberitaan BBC.com (2017), dalam menanggapi ini kemudian pemerintah Myanmar memberikan Kartu Verifikasi Nasional yang digunakan sebagai persyaratan sebelum etnis Rohingya diterima secara resmi sebagai warga negara Myanmar.

KESIMPULAN

Dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, Indonesia menunjukkan peran aktif dalam isu perbantuan kemanusiaan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan diplomasi maraton, dengan di dalamnya terdapat tujuan yang direkomendasikan Indonesia kepada pihak Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satu keberhasilan dari implementasi diplomasi maraton ini adalah seluruh bantuan yang dikirimkan oleh Pemerintah

Indonesia diterima dengan baik oleh otoritas Pemerintah Myanmar. Catatan keaktifan Pemerintah Indonesia dalam pengiriman Kontingen Garuda ke seluruh wilayah konflik di dunia selama ini membuat akreditasi terhadap kegiatan diplomasi kemanusiaan Indonesia kemudian diakui oleh seluruh negara, termasuk Myanmar.

Salah satu keunikan implementasi diplomasi maraton adalah pelibatan seluruh aktor baik negara maupun non-negara yang terlibat dalam kegiatan. Pemerintah Indonesia kemudian melibatkan beberapa unsur seperti Palang Merah Indonesia dan IOM serta tidak lupa berkonsultasi dengan PBB melalui Kofi Annan yang menjadi perwakilan PBB untuk isu Rakhine State. Diplomasi maraton ini kemudian dibawa dalam sebuah agenda global melalui Sidang Umum PBB, di mana Indonesia menyampaikan pencapaian bantuan kemanusiaan ini dengan terminologi diplomasi maraton pada forum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V. (2022). *Latar Belakang Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/17/120000679/latar-belakang-lahirnya-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia?page=all>
- Ariefana, P. (2017). *Menlu Retno: Saya Diplomasi Maraton dengan Myanmar untuk Rohingya*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2017/09/22/081532/menlu-retno-saya-diplomasi-maraton-dengan-myanmar-untuk-rohingya>
- Aryani, N. S. P. (2019). *Constructive Engagement Sebagai Strategi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Demokratisasi di Myanmar Tahun 2011-2017*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bakry, U. S. (2019). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- BBC News Indonesia. (2015). *Indonesia, Malaysia Siap Tampung Pengungsi dengan Syarat*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150520_dunia_indonesia_malaysia_tampung
- BBC News Indonesia. (2017). *Kofi Annan Minta Myanmar Akui Etnik Rohingya sebagai Warga Negara*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39297638>

-
- Bhattacharjee, A. (2019). *Rohingya Crisis: Policy Options and Analysis*.
- Bhawono, A. (2017). *Riwayat Panjang Hubungan RI – Myanmar Tanpa Cela*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3630263/riwayat-panjang-hubungan-ri--myanmar-tanpa-cela>
- Budaya, B. (2017). Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar. *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*, 11(1), 106–120.
- Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. A. (2014). *Handbook Hubungan Internasional*. Nusamedia.
- DPR. (2016). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- DW. (2015). *Inilah Profil Pengungsi Rohingya*. DW. <https://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>
- DW. (2022). *Kronologi 5 Tahun Krisis Rohingya*. DW. <https://www.dw.com/id/kronologi-5-tahun-krisis-rohingya/a-62900002>
- Effendi, T. D. (2011). *Diplomasi Publik Jepang* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Fair, C. C. (2018). *Arakan Rohingya Salvation Army: Not the Jihadis You Might Expect*. Lawfare. <https://www.lawfareblog.com/arakan-rohingya-salvation-army-not-jihadis-you-might-expect>
- Gunawan, V. (2017). *Isu Myanmar dan Diplomasi Maraton RI di PBB*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/isu-myanmar-dan-diplomasi-maraton-ri-di-pbb/4039173.html>
- Hidayat, E. (2017). *Memaknai Maraton Diplomasi Kemanusiaan untuk Pengungsi Rakhine*. Medcom.Id. <https://www.medcom.id/internasional/asia/aNrWEzgb-memaknai-maraton-diplomasi-kemanusiaan-untuk-pengungsi-rakhine>
- Indonesia Baik. (2017). *Bantuan Kemanusiaan Untuk Rohingya*. Indonesia Baik. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/bantuan-kemanusiaan-untuk-rohingya
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon. (n.d.). *Hubungan Bilateral Indonesia - Myanmar*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/yangon/id/read/hubungan-bilateral-indonesia-myanmar/1743/etc-menu>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>
- Maulana, V. (2017). *Myanmar Tolak Bantuan PBB untuk Rakhine*. SINDOnews. <https://international.sindonews.com/berita/1236576/40/myanmar-tolak-bantuan->

- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Mitzy, G. I. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. *Global South Review*, 1(2), 153–164. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28836>
- Revolusi, A. (2013). *Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012*. Universitas Jember.
- Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan ASEAN dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 83–97. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>
- Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Journal of Islamic World and Politics*, 2(2), 367–385. <https://doi.org/10.18196/jiwp.2221>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syahmin. (2008). *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Rajawali Pers.
- Tindaon, S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan atas Imigran Rohingya dalam Pelanggaran HAM Berat di Myanmar dari Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Journal of USU International Law*, 1(2).
- Tysara, L. (2022). 6 Penyebab Konflik Rohingya dan Penjelasannya. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/4971712/6-penyebab-konflik-rohingya-dan-penjelasannya>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2017). *Mission Report of OHCHR Rapid Response Mission to Cox's Bazar, Bangladesh*.